

**PANDANGAN LEMBAGA PENYEDIA MODAL TERHADAP STANDAR KUALITAS
LAPORAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SAMBAS**

***THE PERSPECTIVE OF CAPITAL PROVIDING INSTITUTIONS ON THE QUALITY
STANDARDS OF AGRICULTURAL SECTOR REPORTS IN SAMBAS REGENCY***

¹Nugra Irianta Denashurya

¹Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

Although the economic growth of Sambas Regency reached 4.63%, the poverty and unemployment rates are still high, reaching 7%, so the government is developing the agricultural sector to overcome this problem with the support of financial institutions that facilitate business capital for prospective entrepreneurs with certain qualifications. The main objective of this study is to identify how financial reports are made by the agricultural sector in Sambas Regency at this time and to understand the views of capital providers on the quality standards of these financial reports. A descriptive approach by collecting data from various sources to describe and interpret current conditions through a questionnaire survey of 30 capital institutions and 10 agricultural sectors in Sambas Regency, which were randomly selected from the population of capital providers and agricultural sectors that met the criteria for financial reports was used in the study. Qualitative methods were used to analyze variables that include the use of financial reports in the agricultural sector and the views of capital providers in Sambas Regency, with a focus on recording by Financial Accounting Standards, understanding financial reports, and report quality based on standards such as Relevance, Understandability, Verifiability, Neutrality, Timeliness, Comparability, and Completeness.

Key-words: Agricultural Sector, Capital Institution's View, Financial Reports

INTISARI

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas mencapai 4,63%, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, mencapai 7%, sehingga pemerintah mengembangkan sektor pertanian untuk mengatasi masalah tersebut dengan dukungan lembaga keuangan yang memfasilitasi modal usaha bagi calon wiraswasta sesuai kualifikasi tertentu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh sektor pertanian di Kabupaten Sambas saat ini dan memahami pandangan lembaga penyedia modal terhadap standar kualitas laporan keuangan tersebut. Pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menggambarkan dan menafsirkan kondisi saat ini melalui survei kuesioner pada 30 lembaga permodalan dan 10 sektor pertanian di Kabupaten Sambas, yang dipilih secara acak dari populasi lembaga penyedia modal dan sektor pertanian yang memenuhi kriteria laporan keuangan digunakan dalam penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis variabel yang mencakup pemanfaatan laporan keuangan di sektor pertanian dan pandangan lembaga penyedia modal di Kabupaten Sambas, dengan fokus pada pencatatan sesuai Standar Akuntansi Keuangan, pemahaman laporan keuangan, dan kualitas laporan berdasarkan standar yaitu *Relevance, Understandability, Verifiability, Neutrality, Timeliness, Comparability, dan Completeness*.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Pandangan Lembaga Penyedia modal, Sektor Pertanian

¹ Alamat penulis untuk korespondensi: Nugra Irianta Denashurya. Email: ndenashurya@faperta.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Di awal era globalisasi ini kemajuan akan IPTEK maupun komunikasi dan transportasi mendukung pertumbuhan sektor ekonomi bangsa Indonesia yang kian berkembang pesat. Kemajuan tersebut mempengaruhi pemberdayaan sumber daya alam yang telah ada di Indonesia saat ini. Sejak dulu, Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Namun, hal tersebut tak lantas menjadikan Indonesia negeri yang kaya dan makmur penduduknya. Salah satu masalah sosial yang tengah melanda negeri kita tercinta ini adalah masalah pengangguran dan kemiskinan (Aisiyah *et al.*, 2023).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, pemerintah telah mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian. Sektor ini dipilih sebagai solusi karena kontribusinya yang signifikan, yaitu sebesar 13,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama 2019-2022 (Kementerian Pertanian, 2023a). Sektor ini juga menyerap 38,14 juta tenaga kerja atau 27,52% dari total populasi Indonesia (Kementerian Pertanian, 2023b). Namun, dalam upaya memanfaatkan potensi sektor pertanian, diperlukan sistem pencatatan laporan keuangan yang lebih baik agar lembaga penyedia modal dapat menilai kelayakan kredit dan memastikan keberlanjutan pengembangan usaha di sektor ini.

Dalam proses pengembangan kebijakan baru, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perbankan, Dinas Koperasi dan UKM, serta sektor swasta menjadi kunci utama. Mereka membentuk lembaga untuk memfasilitasi peminjaman modal, yang terbagi menjadi dua jenis: Lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori utama: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank mencakup Bank Swasta dan Bank Pemerintah, sementara

lembaga keuangan non-perbankan mencakup credit union, pegadaian, koperasi, dan perusahaan asuransi (Labetubun *et al.*, 2021). Lembaga ini berperan dalam menyalurkan modal yang diberikan oleh pemerintah dan bank umum kepada calon wiraswasta. Modal tersebut diberikan dalam bentuk kredit yang dapat dikembalikan secara berkala atau cicilan, dengan syarat sektor pertanian memenuhi kualifikasi tertentu.

Lembaga penyedia modal harus mampu menilai dan memilih sektor pertanian yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan dan pembinaan. Dalam proses ini, lembaga penyedia modal menetapkan berbagai syarat dan prosedur untuk menilai Kapabilitas serta layaknya suatu sektor pertanian dalam hal mengembalikan modal, termasuk kredit. Salah satu parameter untuk sektor pertanian yang memenuhi syarat adalah keberadaan laporan keuangan yang detail dan memenuhi standar yang diterapkan (Mitan *et al.*, 2022).

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menetapkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011. SAK ETAP dirancang untuk entitas seperti sektor pertanian yang menyusun laporan keuangan yang disusun untuk pihak eksternal. ETAP adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang besar dan menyusun laporan keuangan untuk pihak-pihak eksternal, seperti pemilik yang tidak ikut serta langsung dalam operasional bisnis, kreditur, serta lembaga yang memberikan penilaian kredit (Susanto *et al.*, 2020). Entitas dikategorikan sebagai memiliki tanggung jawab publik yang penting apabila mereka mengajukan atau sedang memproses pendaftaran dampak di pasar modal, atau pengelolaan aset dalam kapasitas fidusia untuk publik, mencakup bank, perusahaan asuransi, pialang, dana pensiun, reksa dana, dan lembaga investasi perbankan.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas

No	Indikator Makro	2022
1	Pertumbuhan ekonomi	3,35% - 4,63%
2	Pertumbuhan Angkatan Kerja	1,28%
2	IPM	68,65% - 69,07%
3	Kemiskinan	7,58% - 7,17
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42% - 3,12

Sumber: APBD Kabupaten Sambas, 2022

Umumnya SAK ETAP lebih mudah dimengerti dan kurang rumit dibandingkan dengan SAK Umum. Selain adanya SAK ETAP, kemudahan lain dalam pembukuan akuntansi bagi sektor pertanian adalah meningkatnya ketersediaan software akuntansi buatan dalam negeri, seperti Zahir dan Oracle. Namun, sebagian kecil sektor pertanian yang ada cukup sulit menyanggupi hal tersebut karena kurangnya pengetahuan akan penyusunan laporan keuangan secara benar sesuai dengan SAK yang berlaku. Sehingga, mereka lebih memilih untuk meminjam kepada tengkulak atau badan keuangan yang tidak sah. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai pandangan lembaga-lembaga pendukung modal di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, mengenai kualitas laporan keuangan yang disusun oleh sektor pertanian.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data dari buku, modul perusahaan, dan sumber relevan untuk menggambarkan, mencatat, dan menafsirkan kondisi saat ini serta melakukan evaluasi. Metode survei diterapkan melalui kuesioner kepada 30 lembaga permodalan dan 10 sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Populasi penelitian mencakup seluruh lembaga penyedia modal dan sektor pertanian di

Kabupaten Sambas, dengan sekitar 58 unit lembaga penyedia modal yang meliputi 46 lembaga keuangan bank dan 12 lembaga keuangan non-bank berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2014, serta sekitar 273 unit sektor pertanian aktif. Sampel penelitian diambil secara acak dari lembaga permodalan dan sektor pertanian yang memenuhi kriteria, yaitu lembaga penyedia modal yang memberikan kredit dan sektor pertanian yang membuat laporan keuangan, dengan rincian 30 lembaga keuangan (18 bank dan 12 non-bank) dan 10 sektor pertanian.

Laporan keuangan tidak hanya penting bagi sektor pertanian untuk memperoleh kredit, tetapi juga untuk menilai perkembangan usaha di masa depan dan mengevaluasi kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha dan membayar kredit (Lase *et al.*, 2022). Penelitian ini memilih sampel dengan cermat untuk menghindari bias, fokus pada sektor pertanian di Kabupaten Sambas yang memiliki laporan keuangan lengkap dan rutin, serta lembaga penyedia modal yang memenuhi standar. Kriteria sampel sektor pertanian mencakup hanya sektor yang berlokasi di Kabupaten Sambas dan menggunakan laporan keuangan, tidak termasuk koperasi. Kriteria lembaga penyedia modal meliputi lembaga keuangan bank (swasta dan pemerintah) dan lembaga non-bank sah seperti pegadaian, *credit union* (CU), koperasi kredit, dan BMT, yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Sambas untuk

memastikan fokus penelitian pada lembaga penyedia modal di daerah tersebut.

Variabel penelitian adalah elemen yang ditetapkan untuk dipelajari guna memperoleh informasi dan menarik kesimpulan tentang objek tersebut (Denashurya *et al.*, 2023). Tujuan penggunaan variabel adalah untuk membatasi permasalahan agar tetap fokus pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Objek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu lembaga penyedia modal dan sektor pertanian pengguna laporan keuangan di Kabupaten Sambas. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama dalam pemanfaatan laporan keuangan oleh sektor pertanian dan pandangan lembaga penyedia modal. Dalam konteks sektor pertanian, variabel pemanfaatan laporan keuangan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pencatatan laporan keuangan, di mana pembuat laporan di sektor pertanian diharuskan untuk mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, memastikan laporan yang disusun akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini penting agar laporan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha yang efektif. Kedua, pemahaman terhadap laporan keuangan, yang memerlukan pembuat laporan dan pihak berkepentingan untuk memahami maksud dan tujuan laporan tersebut. Pemahaman ini lebih terkait dengan kemampuan dan kesadaran individu daripada latar belakang mereka.

Di sisi lain, pandangan lembaga penyedia modal juga menjadi variabel penting dalam penelitian ini. Lembaga penyedia modal mempertimbangkan keadaan keuangan dan manajemen usaha sebagai faktor kunci dalam pemberian kredit modal. Mereka menetapkan beberapa syarat sebelum memberikan pinjaman, salah satunya adalah laporan keuangan yang

lengkap dan sesuai standar. Kualitas laporan keuangan yang dimiliki sektor pertanian ditentukan oleh beberapa aspek penting, seperti *relevance* (relevansi), *understandability* (kemudahan pemahaman), *verifiability* (dapat diverifikasi), *neutrality* (netralitas), *timeliness* (ketepatan waktu), *comparability* (kemampuan dibandingkan), dan *completeness* (kelengkapan). Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan gambaran yang jelas tentang kelangsungan pengembalian modal.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya dan dianggap sebagai data baru yang terkini (Fadilla & Wulandari, 2023). Teknik pengumpulan data primer mencakup observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti Biro Pusat Statistik, Dinas Pertanian, buku, laporan, dan jurnal. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas, dengan sampel kuesioner yang diambil dari lembaga penyedia modal bank dan lembaga permodalan non-bank yang memenuhi kualifikasi untuk wawancara dan distribusi kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Laporan Keuangan pada Sektor Pertanian di Kabupaten Sambas

Penelitian terhadap sektor pertanian di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama sektor pertanian adalah kurangnya penguasaan dan penerapan sistem keuangan yang memadai. Banyak sektor pertanian belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan yang teratur, sehingga tidak mengelola catatan akuntansi secara disiplin. Latar belakang pendidikan tidak signifikan mempengaruhi pandangan pentingnya pembukuan, namun pengetahuan

akuntansi pemilik dan staf masih sangat kurang (Winarso & Yuniarto, 2023). Wawancara dengan pelaku sektor pertanian mengungkapkan bahwa minimnya pengetahuan tentang laporan keuangan menghambat mereka dalam mengajukan tambahan modal ke lembaga permodalan, yang mensyaratkan laporan

keuangan lengkap dan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya praktik akuntansi optimal di sektor pertanian disebabkan oleh pengetahuan akuntansi yang masih belum memadai dan kurangnya kepercayaan serta komunikasi dengan lembaga permodalan terkait SAK-ETAP.

Tabel 2. Daftar Sampel Sektor Pertanian Kabupaten Sambas

No	Nama Sektor Pertanian	Kota/Kabupaten
1.	Padi	Sambas
2.	Jagung	Sambas
3.	Kedelai	Sambas
4.	Kacang Tanah	Sambas
5.	Kacang Hijau	Sambas
6.	Ubi Kayu	Sambas
7.	Ubi Jalar	Sambas
8.	Karet	Sambas
9.	Kelapa Sawit	Sambas
10.	Kakao	Sambas

Sumber: Analisis Data Primer, 2024

Tabel 3. Lembaga Keuangan Bank

No	Nama lembaga	Kota/Kabupaten
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia	Sambas
2.	PT. Bank Negara Indonesia	Sambas
3.	PT. Bank Mandiri	Sambas
4.	PT. Bank Central Asia	Sambas
5.	PT. Bank Kalbar	Sambas
6.	PT. Bank Syariah Indonesia	Sambas
7.	PT. Bank Mega	Sambas
8.	PD. BPR Bank Pasar Kodya	Sambas
9.	PT. BPR Centradana Kapuas	Sambas
10.	PT. BPR Perdana Lintas Khatulistiwa	Sambas
11.	PT. BPR Prima Multi Makmur	Sambas
12.	PT. BPR Cemerlang Kapuas Makmur	Sambas
13.	PT. BPR Sukadana Prima	Sambas
14.	PT. BPR Universal KalBar	Sambas
15.	PT. BPR Dana Wira Buana	Sambas
16.	PT. BPR Ukabima Khatulistiwa	Sambas
17.	PT. BPR Tamara Dana Khatulistiwa	Sambas
18.	PT. BPR Andalan Favorit Perdana	Sambas

Sumber: Analisis Data Primer, 2024

Tabel 4. Lembaga Keuangan Bukan Bank

No	Nama lembaga	Kota/Kabupaten
1.	PT. Pegadaian	Sambas
2.	PNM	Sambas
3.	Ulam	Sambas
4.	Cu. Stella Maris	Sambas
5.	Cu. Keling Kumang	Sambas
6.	Cu. Pancur Kasih	Sambas
7.	Cu. Khatulistiwa Bakti	Sambas
8.	Cu. Muara Kasih	Sambas
9.	Cu. Muara Pesisir	Sambas
10.	Cu. Bina Kasih	Sambas
11.	PT. Indomobile Finance	Sambas
12.	Koperasi Simpan Pinjam	Sambas

Sumber: Analisis Data Primer, 2024

Tabel 5. Jawaban Responden Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Pertanian

Pertanyaan	Jumlah Responden			
	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1. Relevance	30	100%	-	-
2. Understandability	25	83,3%	5	16,7%
3. Verifiability	27	90%	3	10%
4. Neutrality	30	100%	-	-
5. Timelines	28	93,3%	2	6,7%
6. Comparability	27	90%	3	10%
7. Completeness	25	83,5%	5	16,7%
Total Persentase		91,4%		8,6%

Sumber: Data Observasi Lapangan, 2024

Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa sebagian besar sektor pertanian dalam sampel penelitian hanya membuat laporan laba rugi, dengan sedikit yang membuat laporan ekuitas. Sektor pertanian umumnya hanya memahami pembuatan laporan sederhana harian, belum memahami laporan keuangan yang lebih lengkap. Sebagian besar sektor pertanian mendapatkan pinjaman dari BMT dan koperasi karena hanya membutuhkan laporan keuangan sederhana. Kendala utama dalam pencatatan laporan keuangan adalah kurangnya tenaga ahli dan jaranganya sektor pertanian mengikuti penyuluhan pemerintah terkait pencatatan keuangan. Penting bagi sektor

pertanian untuk membuat laporan keuangan yang jelas agar perkembangan usaha terkontrol (Dewi, 2023). Langkah-langkah praktis yang harus diambil termasuk mencatat seluruh transaksi tunai dan kredit, menyimpan bukti transaksi, dan memiliki catatan terpisah untuk kas, piutang, persediaan, harta, hutang, modal, penjualan, dan biaya. Jika diperlukan, buat rincian lebih detil seperti catatan persediaan bahan baku dan aset tetap. Saldo akhir dari catatan ini kemudian dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi.

Daftar beberapa sektor pertanian di Kabupaten Sambas yang penulis wawancarai dan bagikan kuesioner sebagai bahan acuan

tambahan dalam penelitian tersaji pada tabel 2. Peran sampel sektor pertanian ini menjadi variabel tambahan untuk memperjelas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penyebab utama belum optimalnya pencatatan transaksi usaha pada sektor pertanian, yaitu anggapan bahwa pencatatan transaksi belum diperlukan dan hanya membuang waktu, pandangan bahwa pencatatan tidak bermanfaat untuk operasional sehari-hari, fokus pengelola usaha pada produksi dan rutinitas harian sehingga tidak ada waktu untuk pencatatan, terbatasnya pengetahuan tentang cara mencatat keuangan, dan kekhawatiran bahwa pencatatan lengkap akan meningkatkan pajak. Pencatatan transaksi kas sangat penting bagi sektor pertanian karena merupakan dasar informasi keuangan, membantu mengetahui selisih rugi/laba, dan memantau kas harian (Andayani & Aprilia, 2020).

Pandangan Lembaga Penyedia modal Terhadap Kualitas dari Laporan Keuangan Sektor Pertanian

Penelitian ini berfokus pada pandangan lembaga penyedia modal terhadap kualitas laporan keuangan sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Lembaga-lembaga yang menjadi sampel penelitian diminta memberikan pendapat pribadi tentang kualitas laporan keuangan sektor pertanian binaan mereka. Lembaga-lembaga yang menjadi sampel dalam penelitian ini tersaji pada tabel 3. Berdasarkan wawancara dan kuesioner terhadap 30 lembaga penyedia modal, diperoleh hasil penelitian mengenai pandangan mereka terhadap kualitas laporan keuangan sektor pertanian di Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Hasil Kuesioner

Data tersebut disajikan dalam tabel yang menunjukkan persentase jawaban dari lembaga penyedia modal berdasarkan karakteristik umum laporan keuangan berkualitas berupa *Relevance*, *Understandability*, *Verifiability*, *Neutrality*,

Timeliness, *Comparability*, dan *Completeness* menurut APB (*Accounting Principal Board*). Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner, 91,4% lembaga penyedia modal menilai laporan keuangan sektor pertanian binaan mereka berkualitas sesuai standar penilaian. Meskipun mengambil risiko, lembaga-lembaga ini tetap mengawasi sektor pertanian karena rata-rata pengembalian kredit masih kurang lancar. Mereka juga memberikan pelatihan sederhana tentang pengelolaan modal dan mewajibkan sektor pertanian menjadi anggota lembaga tersebut

2. Hasil Wawancara

Hasil penelitian wawancara kuesioner dengan 30 lembaga penyedia modal menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan lembaga lebih dominan daripada pandangan pribadi individu. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan sah perusahaan. Berikut beberapa contoh kebijakan dari hasil wawancara kuesioner yang diperoleh yaitu:

- a. Sektor usaha yang menerima pendanaan harus terlebih dahulu menjadi anggota lembaga tersebut.
- b. Sektor usaha yang telah menjadi anggota tetap lembaga ini diharuskan mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan setelah pendaftaran.
- c. Keanggotaan hanya dapat diberikan kepada sektor usaha yang telah beroperasi selama paling tidak satu tahun.
- d. Sektor usaha yang bergabung sebagai anggota tidak diperkenankan memiliki hubungan kontraktual dengan lembaga permodalan lain.
- e. Sektor usaha yang menjadi anggota harus menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap usaha yang dijalankannya.

KESIMPULAN

1. Penelitian mengenai pandangan lembaga permodalan terhadap laporan keuangan sektor pertanian di Kabupaten Sambas

menunjukkan bahwa 100% sektor pertanian menggunakan laporan laba rugi, tetapi hanya 60% yang menggunakan laporan ekuitas. Tidak ada sektor pertanian yang menggunakan laporan neraca dan arus kas, karena tidak memahami atau merasa belum memerlukan laporan-laporan tersebut. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya staf yang terampil serta anggapan bahwa pencatatan transaksi tidak diperlukan atau hanya membuang waktu. Faktor lain termasuk fokus pada kegiatan operasional sehari-hari dan kekhawatiran tentang peningkatan pajak. Selain itu, sektor pertanian kurang memahami panduan SAK ETAP yang dirancang untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dari sisi lembaga permodalan, 91,4% dari 30 responden menilai laporan keuangan sektor pertanian binaan mereka berkualitas, sementara 8,6% lainnya mengidentifikasi kendala dalam pencatatan yang sesuai SAK ETAP. Lembaga keuangan bank memiliki kebijakan ketat dalam pemberian kredit dengan aturan tegas dan sanksi atas keterlambatan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank menawarkan kebijakan yang lebih ringan dengan bunga lebih kecil dan pelatihan bagi anggota sebelum pinjaman diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, A., E.B. Ayu, Khoerunnisa, & M. Rahayu. 2023. Dampak Perkembangan UMKM Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*. 3 (1): 1-15. <https://doi.org/10.15575/prestise.v3i1.30443>
- Andayani, T.D. & E. Aprilia. 2020. Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Cv Wijaya. *Neraca*. 16 (2): 103-110. <https://doi.org/10.48144/neraca.v16i2.501>
- APBD Kabupaten Sambas. 2022. *Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Sambas 2022*. Available at: <https://sambas.go.id/file/transparansi/transparansi-34.pdf>. [Date accessed: September 7, 2024]
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. 2023. Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sambas. Available at: <https://sambaskab.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html>. [Date accessed: September 7, 2024].
- Denashurya, N.I., Nurliza, E. Dolorosa, D. Kurniati, & D. Suswati. 2023. Overcoming Barriers to ISPO Certification: Analyzing the Drivers of Sustainable Agricultural Adoption among Farmers. *Sustainability*. 15 (23), 16507. <https://doi.org/10.3390/su152316507>
- Dewi, S.R. 2023. Upgrading Tata Kelola Keuangan Bagi UMKM Terintegrasi Dengan Financial Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4 (1). 135-147. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1144>
- Fadilla, A.R. & P.A. Wulandari. 2023. Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*. 1 (3). 34-46.
- Kementerian Pertanian. 2023a. *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2023b. *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian (Februari 2023)*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Indonesia. Jakarta.

- Labetubun, M.A.H., A.Z. Maulida, D. Triwardhani, H. Husain, C. Bagenda, L. Nugroho, T. Hargyatni, S. Santi, U.S. Mubarrok, A. Purnomo, R. Tomahuw, P. Komarudin, E. Murdiyanto & A. Sudirman. 2021. *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung.
- Lase, L.P.D., A. Telaumbanua, & A.R. Harefa. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas. *JAMANE: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*. 1 (2). 254–260. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.37>
- Mitan, W., P.L. Lamawitak, & M.F. Sumiyati. 2022. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). *Jurnal Accounting*. 1 (2). 28-38. <https://doi.org/10.2221/accounting.v1i2.24>
- Susanto, S., A. Zarefar, & F. Ali. 2020. Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. 13 (1): 41-50. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i1.3601>
- Winarso, B.S. & A.S. Yuniarto. 2023. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Teknologi Informasi, Ukuran Usaha, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Sosialisasi terhadap Penerapan SAK EMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12 (1): 55-63. <https://doi.org/10.32639/jiak.v12i1.318>